

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional Indonesia pada era Society 5.0 dan disrupsi digital dihadapkan pada tantangan fundamental yang bersifat paradoks. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan kemudahan akses terhadap pengetahuan dan memfasilitasi proses pembelajaran. Di sisi lain, arus globalisasi dan penetrasi digital yang masif turut berkontribusi pada munculnya fenomena kesenjangan karakter di kalangan generasi muda.

Berbagai studi dan observasi di lapangan menunjukkan adanya gejala degradasi moral yang mengkhawatirkan, seperti meningkatnya kasus perundungan (*bullying*) kekerasan di lingkungan sekolah, menguatnya gaya hidup hedonistik, serta lunturnya pemahaman terhadap budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Perkembangan teknologi yang pesat, jika tidak diimbangi dengan fondasi karakter yang kokoh, berpotensi mengikis identitas bangsa dan norma-norma luhur yang berlaku. Kondisi ini menegaskan urgensi pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa, yang perlu ditanamkan secara sistematis sejak dini. (Alvi Nur Azizah, 2023)

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah merumuskan Visi Pendidikan Indonesia yang menjadi kompas arah kebijakan, yaitu "Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila". Visi ini secara tegas menempatkan pembentukan karakter sebagai tujuan akhir dari seluruh ekosistem pendidikan. Untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam kerangka kerja yang operasional, diperkenalkanlah Profil Pelajar Pancasila (P3).

Profil Pelajar Pancasila merupakan rumusan karakter dan kompetensi yang menjadi acuan standar kelulusan bagi peserta didik di seluruh jenjang

pendidikan. Ia dirancang untuk menjawab pertanyaan esensial: "peserta didik dengan profil (kompetensi) seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia?". Dengan demikian, P3 berfungsi sebagai referensi utama dalam upaya membangun sumber daya manusia unggul yang tidak hanya kompeten secara kognitif, tetapi juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dari keenam dimensi yang terkandung dalam Profil Pelajar Pancasila, penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada dimensi pertama, yaitu Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia. Pemilihan dimensi ini didasarkan pada posisinya yang sangat fundamental dan menjadi sumber nilai bagi pengembangan dimensi-dimensi lainnya. Dimensi ini dijabarkan ke dalam lima elemen kunci yang komprehensif, meliputi: (a) akhlak beragama, (b) akhlak pribadi, (c) akhlak kepada manusia, (d) akhlak kepada alam, dan (e) akhlak bernegara (Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka 2, 2022). Penekanan pada dimensi ini bukan tanpa dasar. Ia selaras secara substantif dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Yogi Anggraena, 2020)

Penempatan dimensi "Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia" sebagai dimensi pertama dalam kerangka P3 bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pilihan kebijakan yang strategis. Hal ini merefleksikan urutan sila dalam dasar negara, Pancasila, yang diawali dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Secara pedagogis, ini mengisyaratkan sebuah pandangan bahwa fondasi spiritual dan moral (akhlak) merupakan prasyarat esensial untuk membangun karakter kewarganegaraan lainnya, seperti toleransi dalam kebinekaan global atau semangat kolaborasi dalam gotong royong. Dengan kata lain, pembentukan akhlak mulia dipandang sebagai akar

yang akan menumbuhkan cabang-cabang karakter positif lainnya. Pemahaman ini membuka ruang teoretis yang penting bagi penelitian ini, yaitu untuk menganalisis sebuah kebijakan pendidikan nasional (P3) melalui lensa filsafat pendidikan Islam (konsep Akhlak Mulia), yang menunjukkan adanya konvergensi dan hubungan saling menguatkan antara keduanya.

Untuk memastikan agar Profil Pelajar Pancasila tidak hanya menjadi slogan atau materi hafalan, Kurikulum Merdeka memperkenalkan sebuah inovasi pedagogis yang disebut Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 bukanlah sekadar metode pembelajaran tambahan, melainkan sebuah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. (Tim Penyusun Panduan P5, 2024) Sebagai pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), P5 bersifat kontekstual, lintas disiplin ilmu, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di lingkungan sekitar siswa. Salah satu karakteristik utamanya adalah fleksibilitas, di mana tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajarannya dirancang terpisah dari intrakurikuler dan tidak harus terikat pada target capaian pembelajaran mata pelajaran tertentu. (Yogi Anggraena, 2020)

Urgensi P5 terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan yang sering terjadi dalam pendidikan karakter konvensional. Pembelajaran di kelas seringkali berhenti pada ranah kognitif, di mana siswa hanya mengetahui tentang nilai-nilai kebaikan tanpa benar-benar merasakan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. P5 hadir sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan ini. Melalui P5, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat langsung dalam sebuah proses eksplorasi, investigasi, dan aksi nyata untuk menjawab isu-isu relevan di sekitarnya (Tim Penyusun Panduan P5, 2024). Tujuannya adalah agar karakter tidak hanya dipahami, tetapi dihidupkan (*lived values*) dan pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan atau watak yang melekat (*habit*). P5 memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kompetensi dan karakter secara holistik, mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan dalam satu kesatuan pengalaman belajar.(Badriyah et al., 2021)

Secara prosedural, pelaksanaan P5 di satuan pendidikan mengikuti sebuah alur yang sistematis dan terstruktur. Alur ini umumnya terdiri dari empat tahapan utama: (1) Tahap Pengenalan, di mana fasilitator membangun kesadaran dan pemahaman awal siswa terhadap tema proyek yang dipilih; (2) Tahap Kontekstualisasi, di mana siswa diajak untuk mengidentifikasi dan menggali permasalahan relevan yang terjadi di lingkungan sekitarnya; (3) Tahap Aksi, merupakan inti dari proyek di mana siswa merancang, merumuskan, dan melaksanakan solusi atau karya sebagai jawaban atas permasalahan yang ditemukan; dan (4) Tahap Refleksi dan Tindak Lanjut, di mana siswa bersama fasilitator melakukan evaluasi terhadap seluruh proses dan hasil proyek, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk masa depan.(Tim Penyusun Panduan P5, 2024). Seluruh tahapan ini dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip kunci P5, yaitu holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif.

Meskipun secara konseptual P5 merupakan sebuah terobosan pedagogis, implementasinya di lapangan menghadirkan kompleksitas yang melampaui tugas mengajar konvensional. Panduan resmi dari Kemdikbudristek merinci serangkaian langkah yang harus ditempuh sekolah, mulai dari membentuk tim fasilitator, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, merancang modul proyek, mengalokasikan waktu dan anggaran, mengelola asesmen, hingga menyusun pelaporan hasil proyek. Rangkaian aktivitas ini pada hakikatnya bukanlah sekadar tugas pedagogis, melainkan fungsi-fungsi manajemen. Laporan dari berbagai studi implementasi di lapangan mengonfirmasi hal ini, di mana tantangan utama yang dihadapi sekolah bukanlah pada aspek ideologi P5, melainkan pada eksekusinya. Masalah seperti kurangnya sumber daya, kebingungan guru, dan implementasi yang tidak konsisten merupakan gejala klasik dari manajemen proyek yang kurang efektif. Hal ini membawa pada sebuah pemahaman krusial bahwa keberhasilan P5 dalam membentuk karakter siswa sangat bergantung pada

kapasitas manajerial sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek tersebut. Dengan demikian, fokus penelitian ini pada aspek Manajemen Proyek menjadi sangat relevan dan mendasar, karena ia menggeser pertanyaan dari "apakah P5 efektif?" menjadi "bagaimana manajemen P5 menentukan efektivitasnya dalam pembentukan akhlak mulia?".

Penurunan akhlak dan moral di kalangan pelajar telah mencapai tingkat yang meresahkan, membuat nilai-nilai luhur bangsa seperti kejujuran dan tolong-menolong hanya menjadi slogan. Kondisi ini ironis, karena bertentangan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 yang menekankan pembentukan karakter mulia melalui pendidikan. Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, mutu karakter siswa sebagai hasil pendidikan masih rendah. Salah satu penyebab utamanya, menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2007), adalah minimnya peran serta masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap sekolah.

Kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan amanat luhur dalam pembukaan konstitusi, diwujudkan secara konkret melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat siswa pandai secara akademis, tetapi juga berfungsi membentuk watak dan peradaban yang bermartabat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara utuh agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, dan bertanggung jawab.

Sebagai langkah implementasi dari tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan program pendidikan karakter. Kebijakan ini lahir dari keyakinan bahwa hakikat pendidikan itu sendiri adalah proses pembentukan karakter (*character building*). Dengan adanya pendidikan karakter yang komprehensif, diharapkan akan terbentuk kepribadian generasi muda yang memiliki moralitas tinggi, toleran, dan berperilaku baik. Proses pembentukannya pun didasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya keseimbangan

antara olah hati (etika), olah pikir (literasi), olah karsa (estetika), dan olah raga (kinestetika).

Berangkat dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan nasional dirancang tidak hanya untuk mengisi otak, tetapi juga untuk membangun jiwa. Hal ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa fungsi utama pendidikan adalah membentuk watak dan peradaban bangsa yang luhur. Artinya, tujuan akhirnya bukanlah sekadar siswa yang berilmu, tetapi manusia seutuhnya yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan demokratis.

Sistem pendidikan nasional Indonesia, yang berlandaskan amanat konstitusi untuk mencerdaskan bangsa, memiliki misi ganda: tidak hanya mengasah intelektualitas tetapi juga membangun jiwa dan karakter. Misi ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang mengarahkan pendidikan untuk membentuk watak dan peradaban luhur, sehingga melahirkan manusia yang utuh beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan demokratis.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah mengimplementasikannya melalui program pendidikan karakter. Inisiatif ini bertumpu pada prinsip bahwa esensi sejati dari pendidikan adalah pembentukan karakter. Secara praktis, pendidikan karakter dirancang sebagai upaya terencana agar siswa tidak hanya mengetahui, tetapi juga peduli dan menginternalisasi nilai-nilai kebaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, program ini menanamkan serangkaian nilai fundamental yang dianggap krusial. Kemendiknas (2011) merumuskan delapan belas nilai yang menjadi acuan, di antaranya religiusitas, kejujuran, disiplin, kerja keras, semangat kebangsaan, dan kepedulian sosial. Sementara itu, beberapa pakar seperti Koesoema (2010) merangkumnya menjadi nilai-nilai inti yang lebih ringkas, seperti keutamaan, cinta tanah air, dan demokrasi. Seluruh kerangka kerja ini berakar pada filosofi holistik Ki Hajar Dewantara yang meyakini bahwa manusia ideal terbentuk dari sinergi olah hati (etika), olah pikir (kecerdasan), olah karsa (keindahan), dan olah raga (kesehatan).

Hasil laporan masyarakat yang diterima oleh Pusiknas Polri bahwasanya ratusan anak jadi terlapor tindak kriminal. Terangkum dalam empat jenis tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai terlapor yang bersumber dari Pusiknas Polri, yaitu:

Jenis	Jumlah Laporan	Jumlah terlapor berusia kurang dari 17 tahun
Pencurian	17.241 Perkara	437 orang
Penganiayaan dan Pengeroyokan	6.442 Perkara	460 orang
Narkoba	6. 469 Perkara	349 orang
Perkelaihan antara pelajar dan mahasiswa	6 perkara	7 orang

Table 1.1

Empat jenis tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai terlapor

Hasil survey BKKBN seperti dinyatakan Kepala BKKBN Sugiri bahwa: Seks sebelum menikah telah dilakukan sejumlah remaja. Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2016 menunjukkan 51% remaja di Jabodetabek telah melakukan seks pra nikah, artinya dari 100 remaja 51 sudah tidak perawan. Ujar Kepala BKKBN Sugiri Syurif usai memberikan sambutan pada acara Grand Final Kontes Rap dalam memperingati Hari AIDS sedunia di lapangan parkir IRTI Monas. Beberapa wilayah lain di Indonesia, seks pra nikah juga dilakukan beberapa remaja. Misalnya saja di Surabaya tercatat 54%, di Karawang 47% dan 52 % di Medan. Bagaimana dengan kehamilan yang tidak diinginkan? “Hasil penelitian di Yogya dari 1.160 mahasiswa, sekitar 37% mengalami kehamilan sebelum menikah, kata sugiri, selain itu data tentang penyalahgunaan narkoba menunjukkan dari 3,2 juta jiwa yang ketagihan narkoba, 78% adalah remaja. Sedangkan penderita HIV/AIDS terus meningkat setiap tahunnya. Solusinya lanjut dia, konseling untuk remaja

agar tidak melakukan seks pranikah sangat perlu akan terus dilakukan.

Fenomena degradasi moral dan akhlak di kalangan pelajar, termasuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), merupakan isu krusial yang menjadi perhatian berbagai pihak di Indonesia. Data menunjukkan bahwa permasalahan seperti perundungan, tawuran, dan tindak kriminal lainnya masih menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan.

Perundungan di lingkungan sekolah, baik secara verbal, fisik, maupun siber, menjadi salah satu masalah yang paling sering dilaporkan. Data menunjukkan bahwa siswa SMK termasuk dalam kelompok yang rentan menjadi pelaku maupun korban.

Data yang dirilis oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) untuk periode Januari hingga September 2023 mencatat bahwa dari total 23 kasus perundungan yang terjadi di satuan pendidikan, 13,5% di antaranya terjadi di jenjang SMK. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), siswa laki-laki cenderung lebih banyak menjadi korban perundungan dibandingkan siswa perempuan. Pada kategori siswa kelas 11 SMA/SMK, persentase siswa laki-laki yang mengalami perundungan mencapai 19,68%, sementara pada siswa perempuan angkanya sebesar 11,26%.

Sebuah studi yang meneliti insiden perundungan di tingkat SMA secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan terjadi di 75,8% sekolah yang disurvei. Bentuk yang paling umum adalah perundungan verbal (35,1%). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat adanya 87 kasus anak sebagai korban perundungan di lingkungan satuan pendidikan sepanjang Januari hingga September 2023. Fenomena ini juga menjadi objek penelitian khusus di beberapa SMK, seperti yang dilakukan di SMKN 4 Kota Tanjung-pinang, yang menunjukkan bahwa perundungan adalah masalah nyata di tingkat sekolah kejuruan.

Selain perundungan dan tawuran, bentuk-bentuk kenakalan remaja dan tindak kriminal lainnya juga menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Data BPS mengindikasikan bahwa kasus kenakalan remaja mengalami peningkatan sebesar 10,7% setiap tahunnya. KPAI juga melaporkan bahwa pada tahun

2023, kasus kenakalan remaja meningkat menjadi 17,5%. Tawuran atau perkelahian massal antar pelajar masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan karena seringkali berujung pada luka serius bahkan kematian. Siswa pada jenjang SMA/SMK tercatat sebagai kelompok yang paling banyak terlibat. Data mengenai kekerasan di kalangan pelajar menunjukkan bahwa tingkat SMA/SMK memiliki jumlah korban tertinggi, yaitu sebanyak 342 korban. KPAI mencatat bahwa sepanjang tahun 2021, terjadi 240 kasus tawuran pelajar di seluruh Indonesia yang mengakibatkan 35 korban meninggal dunia. Data BPS juga menunjukkan tren tawuran yang fluktuatif, di mana pada tahun 2021, peristiwa ini terjadi di 0,22% desa/kelurahan di Indonesia.

Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Kurikulum Merdeka mengamanatkan pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai strategi penguatan karakter peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk SMK (Kemendikbudristek, 2022). P5 dirancang untuk menghasilkan pelajar Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki semangat gotong royong, kemandirian, kebinekaan global, dan kemampuan berpikir kritis serta kreatif (Kemendikbudristek, 2022). Melalui pembelajaran berbasis proyek, P5 menargetkan agar siswa tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara kognitif, melainkan juga menginternalisasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari (Kemendikbudristek, 2022; Fadillah, 2021).

Secara teoretis, manajemen proyek dalam pendidikan kejuruan mengacu pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan berbasis proyek untuk mengoptimalkan hasil belajar dan pembentukan karakter peserta didik (Sofyan, H., et al., 2017). Model pembelajaran ini efektif untuk membangun sikap, keterampilan, dan akhlak melalui aktivitas mandiri, kolaboratif, serta reflektif (Fadillah, 2021, hlm. 3-4).

Tujuan akhir dari pendidikan adalah lahirnya akhlak mulia, yakni keseluruhan perilaku baik yang bersumber dari kesadaran dan kebiasaan internal. Akhlak mulia ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan

manifestasi otomatis dari karakter-karakter luhur yang tertanam kuat dalam diri seseorang. Oleh karena itu, pendidikan pada hakikatnya adalah upaya mendesak untuk menanamkan karakter esensial seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan rasa peduli. Proses penanaman karakter ini hanya akan berhasil jika dilakukan secara sinergis oleh tiga lingkungan utama: rumah, sekolah, dan masyarakat. Melalui pendekatan terpadu inilah, upaya membangun manusia yang mandiri dan berkarakter dapat tercapai.

Akhlak mulia adalah karakter baik yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang dan termanifestasi menjadi kebiasaan dalam perbuatan-perbuatan positif. Sosok Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai teladan terbaik karena beliau memiliki akhlak yang agung, yang menjadi cerminan sejati dari ajaran Islam dan tuntunan Al-Quran.

Cakupan akhlak mulia sangatlah luas, namun intinya terletak pada kemampuan menjaga hubungan yang baik dalam empat dimensi utama kehidupan: hubungan dengan Sang Pencipta, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Rasulullah telah mencontohkan secara sempurna bagaimana menjaga keseimbangan di antara keempat dimensi ini tanpa mengorbankan satu sama lain.

Prinsip keseimbangan ini sangat fundamental, bahkan dalam urusan ibadah sekalipun. Rasulullah menegaskan pentingnya menyeimbangkan hubungan vertikal dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan horizontal dengan manusia (*hablum minannas*), termasuk diri sendiri. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan beribadah kepada Allah tanpa melalaikan hak-hak dirinya, keluarga, maupun orang lain. Hal ini tercermin dalam anjuran menunda sahur dan menyegerakan berbuka saat berpuasa, yang menunjukkan bahwa pengabdian kepada Tuhan harus berjalan selaras dengan tanggung jawab kepada diri dan sosial.

Akhlak mulia adalah watak baik yang melekat dalam jiwa dan diekspresikan melalui perbuatan positif yang menjadi kebiasaan. Nabi Muhammad SAW adalah representasi puncak dari akhlak ini, di mana karakternya identik dengan ajaran Islam dan tuntunan Al-Quran.

Praktik akhlak mulia ini harus terwujud secara seimbang dalam empat dimensi hubungan: dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Konsep keseimbangan ini merupakan pesan inti ajaran beliau, di mana hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) tidak boleh menyebabkan pengabaian terhadap hubungan dengan sesama (*hablum minannas*). Bahkan dalam ritual ibadah seperti puasa, prinsip ini terlihat jelas melalui anjuran untuk tidak memberatkan diri, yang menegaskan bahwa pengabdian kepada Tuhan harus selaras dengan pemenuhan hak-hak pribadi dan sosial.

Akhlak yang mulia harus juga terwujud dalam hubungannya dengan lingkungan, baik hewani maupun nabati. Memberi makanan kepada hewan piaraan adalah sebuah contoh akhlak yang mulia. Rasulullah pernah menggambarkan bahwa ada seorang wanita yang masuk Neraka karena kucing. Wanita itu mengurung kucingnya tanpa diberikan makanan dan minuman hingga mati, dan ada juga yang menggambarkan seorang wanita tuna susila yang masuk Syurga karena menolong seekor anjing yang sangat kehausan. Memanfaatkan alam dengan segala potensinya harus sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan alam dan lingkungan yang berlebihan akan menimbulkan mudarat bagi kehidupan manusia.

Kumpulan dari akhlak-akhlak yang mulia dengan segala dimensinya itu paling mudah dilihat pada saat seseorang dalam keadaan berihram. Pada saat itu seseorang wajib menjaga larangan-larangan dalam berihram, tidak boleh menambahkan dan mengurangi apa yang sudah ada di dalam diri, tidak boleh berjidal satu sama lain, tidak boleh berbicara yang kotor, tidak boleh membunuh hewan buruan, dan tidak boleh memotong pepohonan, serta senantiasa menjaga kekhusyuan kepada Allah. Begitu banyak akhlak mulia yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, melalui ayat-ayat al-Quran dan hadist-hadistnya. Wajarlah kalau mereka yang berakhlak mulia itu menjadi penghuni Syurga.

Menurut pandangan para pemikir Islam modern, akhlak didefinisikan sebagai sifat dasar yang telah tertanam kuat dalam jiwa sehingga mampu

melahirkan perbuatan secara spontan, tanpa memerlukan proses pemikiran yang panjang. Kualitas akhlak seseorang ditentukan oleh tindakan yang muncul darinya; jika perbuatan itu baik menurut akal dan ajaran agama, maka ia disebut akhlak mulia, dan begitu pula sebaliknya.

Senada dengan itu, ditegaskan pula bahwa akhlak adalah karakter atau moral internal yang menjadi motor penggerak langsung bagi setiap perbuatan. Ia membimbing seseorang untuk secara sadar melakukan apa yang benar dan meninggalkan apa yang salah. Hubungan antara akidah (keyakinan) dan akhlak menjadi sangat krusial. Akidah yang tidak disertai akhlak diibaratkan seperti pohon besar yang tak berguna tidak dapat memberi keteduhan dan tidak pula menghasilkan buah. Sebaliknya, akhlak yang tidak berlandaskan pada akidah yang kokoh laksana bayangan semu dari benda yang selalu bergerak; ia tampak ada, namun tidak memiliki substansi dan pijakan yang pasti.

Dalam kaitan pembagian akhlak ini, Ulil Amri Syafri (2014) mengutip pendapat Nashiruddin Abdullah yang menyatakan bahwa : secara garis besar dikenal dua jenis akhlak; yaitu akhlaq al karimah (akhlak terpuji), akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam, dan akhlaq al mazmumah (akhlak tercela), akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat-sifat yang baik pula, demikian sebaliknya akhlak yang buruk terlahir dari sifat yang buruk. Sedangkan yang dimaksud dengan akhlaq al mazmumah adalah perbuatan atau perkataan yang mungkar, serta sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, baik itu perintah maupun larangan-Nya, dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat.

Dalam pemikirannya yang mendalam, Imam Al-Ghazali mengkritik pandangan yang menyamakan akhlak sebatas perbuatan lahiriah semata. Beliau mengamati bahwa banyak orang cenderung menilai akhlak mulia hanya dari perilaku yang tampak dan dilakukan secara berulang, seperti tutur kata yang santun, sikap sopan, ketaatan beribadah, atau kejujuran.

Menurut Al-Ghazali, pandangan semacam ini belum menyentuh esensi (hakikat) dari akhlak itu sendiri. Perbuatan-perbuatan terpuji tersebut sejatinya

barulah "buah" atau manifestasi dari akhlak, bukan akhlak dalam arti sesungguhnya. Bagi Al-Ghazali, akhlak adalah kondisi jiwa (*haiyah an-nafs*) yang tertanam kuat dan darinyalah perbuatan lahir secara spontan tanpa memerlukan banyak pertimbangan. Oleh karena itu, akhlak yang sejati adalah kondisi internal yang kokoh, yang dibentuk berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian secara konsisten akan menghasilkan perbuatan-perbuatan mulia tersebut.

Menurut Ibnu Miskawaih, seorang pelopor dalam filsafat akhlak Islam, esensi akhlak bukanlah sekadar perbuatan lahiriah yang tampak baik dan dilakukan secara terus-menerus. Beliau membedakan secara tegas antara tindakan terpuji dengan sumbernya. Perilaku seperti sopan santun, tutur kata lembut, kejujuran, bahkan ketaatan beribadah, seringkali dianggap sebagai akhlak itu sendiri oleh pandangan umum.

Namun, dalam kerangka pemikiran Ibnu Miskawaih, semua itu lebih tepat disebut sebagai "buah" atau hasil dari akhlak. Akhlak yang hakiki adalah kondisi jiwa (*hal an-nafs*) yang stabil dan permanen, yang menjadi sumber internal bagi lahirnya perbuatan-perbuatan baik secara mudah dan tanpa paksaan. Dengan demikian, fondasi akhlak yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis harus dibangun di dalam jiwa terlebih dahulu, barulah ia akan memancarkan perilaku mulia secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian pendahuluan dengan Kepala Sekolah di SMKN 2 Bapak Anton Susanto, S.Pd., M.Pd. dan SMKN 3 Drs. H. Endang Zanal, M.Ag. Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dalam meningkatkan akhlak mulia siswa masih mengalami banyak hambatan. Tidak mudah untuk mengembangkan pendidikan karakter dalam meningkatkan akhlak mulia siswa karena jaman sekarang para siswa sudah dapat mengakses informasi-informasi di media sosial melalui internet sehingga perbuatan mereka cenderung meniru hal-hal yang tidak baik seperti berbicara kasar, suka berbohong, berpakaian yang jauh dari nilai kesopanan, membully, tawuran antar pelajar dan lain-lain, maka dengan adanya pengaruh eksternal tersebut, pelaksanaan pendidikan karakter

dalam meningkatkan akhlak mulia siswa belum maksimal.

Salah satu faktor yang dapat membuat sebuah program tidak berjalan dengan maksimal adalah masalah pada manajemen baik pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Handoko (2012) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001).

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Handoko, 1999).

Meskipun regulasi pemerintah telah menegaskan urgensi P5 dalam pembentukan akhlak mulia siswa, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan kesenjangan. Sejumlah penelitian menunjukkan gap antara kebijakan dan praktik, di mana substansi penguatan karakter pada siswa SMK belum sepenuhnya terealisasi secara optimal melalui P5 (Septiana, 2025; Angraini, 2025). Hal ini juga diperkuat oleh temuan bahwa terdapat kesenjangan antara teori ideal pendidikan karakter berbasis Pancasila dengan fakta empiris berupa perilaku siswa yang masih menunjukkan lemahnya internalisasi akhlak mulia, baik secara individu maupun sosial (Mujahid, 2023; Gaffar & Suyato, 2025).

Sebagaimana diungkapkan oleh Fadillah (2021, hlm. 5): “Pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kejuruan berpengaruh tinggi terhadap hasil belajar, namun implementasinya masih perlu disesuaikan dengan dinamika

siswa SMK yang heterogen.” Lebih lanjut, data empiris menunjukkan bahwa “pelaksanaan P5 memiliki pengaruh sebesar 39,1% terhadap pembinaan akhlak pribadi siswa, namun masih terdapat 60,1% faktor lain yang mempengaruhi akhlak siswa yang belum terakomodasi dalam kebijakan P5” (Nuraini, 2024, hlm. 7).

Berdasarkan kerangka teoretis yang telah diuraikan, akar permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan yang signifikan antara idealita konseptual dan realita implementasi dalam program penguatan pendidikan karakter di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Secara ideal, program-program ini dirancang untuk menjadi wahana transformatif yang sistematis dalam membentuk akhlak mulia siswa. Namun, pada tataran praktis, efektivitas program tersebut seringkali terhambat oleh tantangan-tantangan manajerial.

Secara spesifik, permasalahan ini berpusat pada belum optimalnya penerapan fungsi-fungsi fundamental manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Kegagalan dalam menjalankan keempat fungsi ini secara terintegrasi dan maksimal mengakibatkan program penguatan karakter cenderung berjalan secara parsial, tidak konsisten, atau bahkan sekadar formalitas. Akibatnya, tujuan utama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur hingga menjadi akhlak mulia—sebuah sifat yang tertanam kuat dalam jiwa dan melahirkan perbuatan baik secara spontan—belum terwujud secara signifikan pada diri siswa dan siswi SMK. Kesenjangan manajerial inilah yang menjadi titik kritis, di mana niat baik kebijakan pendidikan karakter tidak sepenuhnya berhasil diterjemahkan menjadi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat peserta didik.

Pemilihan SMKN 2 Kota Tasikmalaya dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan yang strategis dan relevan, di mana kedua sekolah ini merepresentasikan secara jelas dinamika yang menjadi inti dari permasalahan penelitian. Kedua institusi ini dipilih

bukan karena ketiadaan program, melainkan justru karena adanya komitmen kelembagaan yang kuat dan upaya yang aktif dalam menerapkan penguatan pendidikan karakter, namun di saat yang sama juga dihadapkan pada tantangan implementasi yang nyata di lapangan. Berikut adalah justifikasi mendalam atas pemilihan kedua lokasi tersebut.

Pertimbangan utama adalah adanya kesadaran dan komitmen institusional yang tinggi dari kedua sekolah untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai pilar utama dalam proses pembelajaran. Hal ini tercermin dari pernyataan para pimpinan sekolah yang secara terbuka mengakui bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penanaman nilai-nilai karakter di kalangan siswa masih menjadi area yang memerlukan peningkatan berkelanjutan. Pandangan ini tidak hanya berasal dari internal sekolah, tetapi juga diperkuat oleh observasi dari tokoh masyarakat dan praktisi pendidikan yang memiliki keterkaitan erat dengan kedua sekolah.

KH. Aceng Mubarak, M.Pd., yang menjabat sebagai Wakil Pengurus PCNU Kota Tasikmalaya sekaligus seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMKN 2, serta Kyai Roni Sa'roni, S.Pd., seorang guru PAI di SMKN 3 yang juga menjabat sebagai Ketua Ansor Kecamatan Tamansari, secara independen menyuarakan keprihatinan yang sama. Keduanya, dalam kapasitasnya sebagai pendidik dan tokoh keagamaan, merekomendasikan kedua sekolah ini sebagai lokus penelitian karena menganggap bahwa tingkat internalisasi karakter di kalangan siswa SMK masih belum mencapai level yang ideal. Kondisi ini dipandang krusial mengingat lulusan SMK dipersiapkan untuk terjun langsung ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), di mana akhlak mulia seperti integritas, tanggung jawab, dan etos kerja menjadi kompetensi yang sama pentingnya dengan keterampilan teknis.

Komitmen kedua sekolah tidak hanya berhenti pada level wacana, melainkan telah diwujudkan dalam program-program konkret yang dirancang untuk membina akhlak siswa. Salah satu inisiatif yang menonjol di SMKN 2 adalah implementasi program 'Jurnal Kegiatan Keagamaan'. Program ini merupakan sebuah intervensi terstruktur yang mewajibkan siswa untuk

mendokumentasikan dan mengikuti serangkaian aktivitas pembiasaan positif, seperti pelaksanaan sholat dhuha berjamaah, tadarus Al-Qur'an yang dilaksanakan setiap hari, dan kegiatan istigotsah setiap minggu. Adanya program spesifik seperti ini menunjukkan bahwa sekolah secara proaktif mencari metode dan strategi untuk menanamkan nilai-nilai religius dan moral, menjadikannya sebagai studi kasus yang kaya untuk dianalisis dari perspektif manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya).

Kedua sekolah menawarkan konteks yang kaya untuk digali karena memiliki profil institusional yang saling melengkapi, memungkinkan analisis komparatif yang mendalam.

Di satu sisi, SMKN 3 Tasikmalaya memiliki status sebagai SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) dan secara eksplisit menuangkan komitmennya pada pendidikan karakter dalam visinya: "Mencetak Peserta Didik Cerdas dan Berkarakter Menuju Jabar Juara Lahir Bathin". Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam salah satu misinya untuk "Mewujudkan pengembangan akhlak mulia" yang mencakup integritas, kepedulian sosial, disiplin, dan tanggung jawab. Penegasan visi dan misi ini menunjukkan bahwa penguatan akhlak mulia bukanlah program sampingan, melainkan merupakan inti dari identitas dan tujuan kelembagaan SMKN 3. Keselarasan antara visi sekolah dengan fokus penelitian ini menjadikannya lokus yang ideal untuk mengkaji praktik terbaik (*best practices*) dan bagaimana sebuah visi luhur diterjemahkan ke dalam praktik manajemen sehari-hari.

Di sisi lain, SMKN 2 Tasikmalaya menyajikan konteks sekolah besar dengan kompleksitas manajerial yang tinggi. Dengan jumlah siswa yang sangat besar dan ragam program keahlian yang luas mencakup bidang teknik, teknologi informasi, dan penyiaran, SMKN 2 menjadi representasi tantangan, adaptasi, dan strategi manajemen P5 dalam skala organisasi yang lebih besar dan heterogen. Visi sekolah ini, "Berlandaskan Iman dan Taqwa sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Terpercaya," dengan misi "Membentuk murid yang mempunyai karakter baik dan karakter kuat," juga menunjukkan adanya

landasan filosofis yang kuat untuk program penguatan karakter. Perbandingan antara pendekatan yang diterapkan di SMK Pusat Keunggulan (SMKN 3) dengan yang diterapkan di SMK reguler berskala besar (SMKN 2) berpotensi mengungkap faktor-faktor kontekstual seperti dukungan kelembagaan, budaya sekolah, dan kompleksitas organisasi yang memengaruhi efektivitas manajemen P5.

Lebih lanjut, pemilihan lokus di jenjang SMK secara umum didasarkan pada pertimbangan psikologis dan sosiologis yang fundamental. Siswa SMK berada pada tahap perkembangan usia remaja akhir, sebuah periode krusial di mana mereka telah memiliki kapasitas kognitif untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mulai membentuk identitas diri yang akan dibawa hingga dewasa. Intervensi pendidikan karakter pada fase ini berpotensi besar untuk terinternalisasi menjadi bagian dari kepribadian mereka, bukan sekadar pengetahuan teoretis. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai akhlak mulia pada jenjang ini dipandang sangat strategis, agar kelak saat mereka lulus dan memasuki dunia kerja atau masyarakat luas, mereka tidak hanya membawa bekal keterampilan teknis, tetapi juga fondasi moral yang kokoh yang akan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Akar masalah dari kesenjangan antara kebijakan, teori, dan praktik diidentifikasi pada belum efektifnya manajemen proyek P5 dalam meningkatkan akhlak mulia siswa SMK. Faktor penyebab utamanya meliputi belum optimalnya kompetensi guru dalam mengelola proyek P5, keterbatasan modul ajar yang kontekstual, serta kurangnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial dalam mendukung pembentukan akhlak siswa (Suwarno, 2024; Gaffar & Suyato, 2025).

Situasi nyata di lokasi penelitian menunjukkan bahwa masih banyak siswa SMK yang menghadapi dilema moral dan perilaku yang berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya individualisme, pragmatisme, serta minimnya kepekaan sosial. Interaksi sosial siswa dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu berjalan selaras dengan tujuan kurikulum dan kebijakan karakter (Angraini, 2025; Mujahid, 2023).

Fokus penelitian ini adalah pada esensi manajemen proyek P5 yang fundamental untuk dikaji, sangat aktual dengan kebutuhan pendidikan karakter di era globalisasi, krusial bagi pengembangan praktik pendidikan kejuruan, dan bermakna untuk pemecahan masalah akhlak siswa SMK di Indonesia. Penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di beberapa SMK memperlihatkan bahwa modul ajar, pembinaan guru, serta penerapan strategi manajemen proyek yang adaptif sangat diperlukan agar tujuan penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya “akhlak mulia”, dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan (Suwarno, 2024; Nuraini, 2024).

Dukungan data awal memperlihatkan urgensi evaluasi dan inovasi dalam manajemen proyek P5, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman teori dan pengembangan praktik manajemen proyek pendidikan karakter di lingkungan SMK.

Dengan demikian, pihak sekolah, terutama para guru dan pimpinan, memegang peranan sentral dalam merancang dan mengimplementasikan strategi penguatan karakter yang efektif. Penelitian di SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana fungsi-fungsi manajemen proyek pendidikan karakter dijalankan dalam konteks yang nyata, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya luhur membentuk generasi muda yang berakhlak mulia

Berdasarkan masalah-masalah di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul MANAJEMEN PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5) DALAM MENINGKATKAN AKHLAK MULIA SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) (Studi Deskriptif di SMKN 2 Kota Tasikmalaya dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya)”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

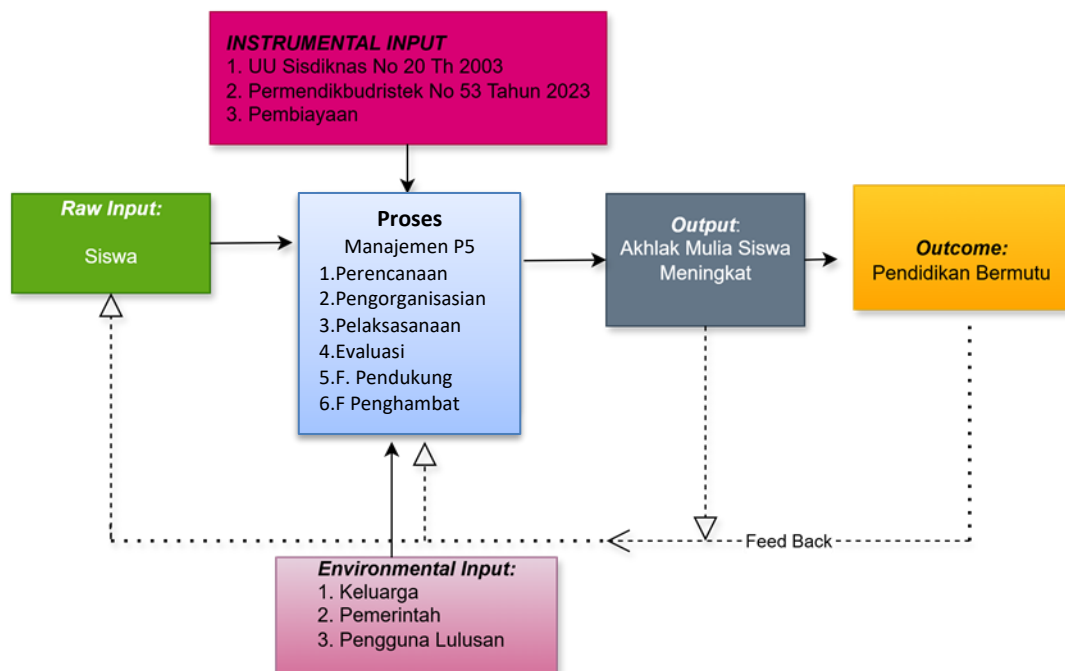
Pendidikan karakter di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama dalam membentuk akhlak mulia siswa di era Society 5.0 dan disrupsi

digital. Kemajuan teknologi dan arus globalisasi membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi, tetapi juga menimbulkan degradasi moral pada generasi muda, seperti peningkatan bullying, gaya hidup hedonistik, dan melemahnya nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah melalui Kemdikbudristek menanggapi tantangan ini dengan mengembangkan Profil Pelajar Pancasila (P3) dan inovasi pembelajaran berbasis proyek, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), sebagai respons strategis untuk menanamkan nilai karakter berlandaskan Pancasila secara holistik. Namun, implementasi P5 dalam praktik pendidikan karakter di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seringkali mengalami hambatan, terutama dalam aspek manajemen proyek, yang menyebabkan efektivitas program dalam meningkatkan akhlak mulia siswa belum optimal. Aspek ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Raw Input*: Karakteristik siswa sebagai individu yang menjadi subjek utama dalam pembelajaran, yang membawa potensi serta tantangan perkembangan karakter di era digital.
- b. *Instrumental Input*: Kebijakan pendidikan nasional, khususnya kebijakan P3 dan panduan pelaksanaan P5 yang menjadi acuan operasional dalam pembentukan karakter siswa.
- c. *Environmental Input*: Kondisi lingkungan eksternal seperti keluarga, komunitas, dan pengguna lulusan yang memberi pengaruh signifikan terhadap internalisasi nilai karakter pada siswa.
- d. *Proses*: Manajemen proyek P5 yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang menjadi penentu keberhasilan implementasi program penguatan karakter.
- e. *Output*: Terbentuknya akhlak mulia siswa yang mencerminkan perilaku moral yang konsisten dan terinternalisasi sebagai hasil nyata pembelajaran karakter berbasis proyek.
- f. *Outcome*: Terwujudnya pendidikan bermutu yang mampu menghasilkan lulusan berkarakter unggul, produktif, dan bertanggung jawab di masyarakat dan dunia kerja.

- g. *Feedback*: Evaluasi dan umpan balik dari semua pihak terkait yang digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan manajemen proyek P5 sehingga menghasilkan dampak pembelajaran yang berkelanjutan.

Ketergantungan dan interaksi antara faktor-faktor di atas membentuk sebuah paradigma penelitian yang sistemik, di mana keberhasilan peningkatan akhlak mulia siswa sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen proyek pendidikan karakter yang dijalankan secara terpadu dan terkelola dengan baik.



Gambar 1.1. Perumusan Masalah

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan penelitian yang akan diteliti, penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek manajemen proyek dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang berfokus pada peningkatan akhlak mulia siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pembatasan ini merujuk kepada teori manajemen GR Terry dan

pendidikan karakter yang meliputi fungsi manajemen utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Handoko, 2012; Wibowo, 2016), serta kebijakan Kemdikbudristek tentang implementasi P5 sebagai bentuk penguatan karakter berbasis proyek.

- 1) Perencanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya, meliputi:
 - a) Penyusunan strategi integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kegiatan proyek
 - b) Penentuan tujuan pembelajaran dan capaian karakter yang jelas dan terukur
 - c) Penyediaan sumber daya (waktu, tenaga, sarana-prasarana) yang memadai
 - d) Penyusunan jadwal dan tahapan pelaksanaan proyek secara terstruktur
 - e) Penyusunan modul dan instrumen pendukung kegiatan P5
- 2) Pengorganisasian Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya, meliputi:
 - a) Pembentukan tim fasilitator/proyek dengan pembagian tugas yang jelas
 - b) Koordinasi antar guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan terkait
 - c) Penataan struktur komunikasi dan pelaporan dalam pelaksanaan proyek
 - d) Penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan proyek
 - e) Pelibatan berbagai pihak (siswa, keluarga, masyarakat) dalam kegiatan proyek

- 3) Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya, meliputi:
 - a) Konsistensi dalam menjalankan kegiatan P5 sesuai jadwal dan modul yang direncanakan
 - b) Pelaksanaan aktivitas proyek secara partisipatif dan kontekstual oleh siswa
 - c) Monitoring langsung terhadap keterlibatan dan perkembangan siswa selama proyek
 - d) Pemberian motivasi dan dukungan oleh guru dan fasilitator
 - e) Implementasi inovasi dan penyesuaian kegiatan sesuai kondisi nyata di lapangan
- 4) Pengawasan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya, meliputi:
 - a) Pengumpulan data pelaksanaan dan hasil proyek secara berkala (monitoring)
 - b) Evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran karakter dan output proyek
 - c) Identifikasi kendala dan hambatan selama proses pelaksanaan proyek
 - d) Penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan bagi siklus selanjutnya
 - e) Umpan balik yang konstruktif kepada guru, siswa, dan pemangku kepentingan
 - f) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek dan hasilnya.
- 5) Faktor Pendukung Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya, meliputi:

- a) Kebijakan nasional dan pedoman P5 yang jelas dan dapat diakses
 - b) Dukungan manajemen sekolah (kepala sekolah, wakil, dan staf) terhadap program
 - c) Ketersediaan fasilitas dan media pembelajaran yang memadai
 - d) Keterlibatan aktif guru yang kompeten dan motivasi tinggi
 - e) Partisipasi keluarga dan komunitas sekolah dalam mendukung aktivitas P5
- 6) Faktor Penghambat Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya, meliputi:
- a) Minimnya pemahaman dan penguasaan materi P5 oleh tenaga pendidik
 - b) Keterbatasan waktu dan beban tugas guru yang tinggi
 - c) Kurangnya sumber daya sarana-prasarana yang memadai
 - d) Rendahnya dukungan dari pihak sekolah atau kurangnya komitmen manajemen
 - e) Hambatan eksternal seperti gangguan sosial, pengaruh negatif media sosial

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mendapatkan informasi/gambaran dan menganalisis tentang Manajemen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya

b. Tujuan Khusus

Untuk mendapatkan gambaran/informasi dan menganalisis tentang:

- 1) Perencanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya
- 2) Pengorganisasian Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya
- 3) Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya
- 4) Evaluasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya
- 5) Faktor Pendukung Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya
- 6) Faktor Penghambat Manajemen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya

2. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai manajemen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam meningkatkan akhlak mulia siswa SMK ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis bagi pengembangan khazanah keilmuan maupun secara praktis bagi para pemangku kepentingan di dunia pendidikan

a. Manfaat Teoritis

Penelitian terkait manajemen penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan akhlak mulia siswa SMK dapat menjadi khazanah dalam pengembangan disiplin keilmuan untuk mendukung terbangunnya penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan akhlak mulia siswa

SMK. Secara lebih spesifik, manfaat teoretis dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:.

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dengan menerapkan kerangka kerja manajemen dari George R. Terry yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC) untuk menganalisis sebuah program kurikulum modern, yaitu P5. Dengan menjadikan P5 sebagai objek studi manajemen proyek, penelitian ini menguji relevansi dan aplicability teori manajemen fungsional dalam konteks organisasi pendidikan yang dinamis. Hasilnya akan memperkaya literatur manajemen pendidikan dengan menyajikan sebuah model analisis empiris tentang bagaimana fungsi-fungsi manajerial menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan
- 2) Disertasi ini menjembatani konsep kebijakan pendidikan nasional (Profil Pelajar Pancasila) dengan konsep filosofis yang mendalam dari khazanah pendidikan Islam (Akhlak Mulia). Penelitian ini secara teoretis menunjukkan bagaimana sebuah program berbasis proyek dapat menjadi wahana efektif untuk proses internalisasi nilai-nilai luhur, dari sekadar pengetahuan (*knowing the good*) menjadi sebuah kebiasaan dan watak yang melekat (*being good*). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan karakter dengan menawarkan sebuah perspektif manajemen yang sistematis untuk mencapai tujuan pembentukan akhlak yang hakiki.
- 3) Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam studi implementasi kurikulum di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan berfokus pada manajemen P5, penelitian ini bergeser dari pertanyaan "apakah P5 efektif?"

menjadi "bagaimana manajemen P5 menentukan efektivitasnya?". Ini menawarkan sebuah model evaluasi kurikulum yang tidak hanya berfokus pada hasil belajar siswa (*output*), tetapi juga pada kualitas proses manajerial (*throughput*) yang dijalankan oleh sekolah. Temuan ini akan memperkaya studi kurikulum dengan menyoroti pentingnya kapasitas manajerial sebagai prasyarat keberhasilan program pembelajaran berbasis proyek di lingkungan pendidikan vokasi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1) Kepala Dinas Pendidikan

Sebagai penanggung jawab kebijakan pendidikan di tingkat regional, Dinas Pendidikan memerlukan data dan analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan nasional di lapangan. Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat berupa:

- a) Menyediakan potret nyata mengenai tantangan manajerial yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan P5. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan untuk merumuskan kebijakan, program pelatihan, atau alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kapasitas manajerial kepala sekolah dan guru di wilayahnya.
- b) Menyajikan model manajemen P5 yang efektif, yang teridentifikasi dari studi kasus di SMKN 2 dan SMKN 3. Model ini dapat didiseminasikan sebagai referensi atau panduan bagi sekolah-sekolah lain, khususnya SMK, dalam merancang dan mengelola program P5 agar lebih berdampak pada pembentukan akhlak mulia siswa.
- c) Memberikan kerangka kerja (berbasis POAC) yang dapat digunakan oleh pengawas sekolah dalam melakukan

supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan P5. Dengan kerangka ini, proses supervisi menjadi lebih terstruktur, tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga kualitas proses manajemen secara keseluruhan.

2) Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai manajer tertinggi di satuan pendidikan memegang peran kunci dalam keberhasilan P5. Penelitian ini akan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a) Menawarkan sebuah kerangka kerja yang jelas dan operasional (POAC) untuk mengelola P5 secara efektif, mulai dari tahap perencanaan (misalnya, merancang modul proyek yang relevan), pengorganisasian (membentuk tim fasilitator yang solid), pelaksanaan (memotivasi guru dan siswa), hingga pengawasan (melakukan asesmen karakter yang bermakna).
- b) Mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi P5. Wawasan ini akan membantu kepala sekolah untuk mengantisipasi potensi masalah dan merancang strategi mitigasi yang efektif, seperti mengatasi perbedaan persepsi antar guru atau keterbatasan sumber daya.

3) Guru

Guru berperan sebagai fasilitator di garda terdepan pelaksanaan P5 dan seringkali menghadapi tantangan praktis di lapangan.

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah:Peneliti berikutnya

- a) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana peran mereka sebagai fasilitator terhubung dengan keseluruhan siklus manajemen proyek P5. Hal ini dapat membantu guru untuk bekerja lebih sinergis dalam tim dan memahami tujuan dari setiap tahapan proyek
- Pertanyaan Penelitian

- b) Menyajikan contoh-contoh konkret tentang praktik fasilitasi yang berhasil membangkitkan partisipasi siswa dan metode asesmen yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan akhlak mulia secara kualitatif, seperti melalui observasi, jurnal refleksi, atau rubrik penilaian karakter.
 - c) Wawasan dari penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi guru untuk pengembangan profesional berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada pembentukan karakter.
- 4) Peneliti Selanjutnya
- Setiap penelitian yang baik harus mampu membuka jalan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Disertasi ini diharapkan memberikan manfaat bagi para peneliti berikutnya dalam bentuk:
- a) Menyediakan data kualitatif yang kaya dan mendalam serta kerangka teoretis yang unik (sintesis manajemen POAC dan konsep Akhlak Mulia) yang dapat menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut.
 - b) Membuka ruang untuk penelitian lanjutan, misalnya penelitian kuantitatif untuk menguji model yang dihasilkan dalam skala yang lebih besar, penelitian komparatif antar jenjang pendidikan (misalnya SMK vs. SMA), atau penelitian yang berfokus pada salah satu fungsi manajemen secara lebih spesifik.
 - c) Menjadi contoh studi kasus kualitatif dalam bidang manajemen pendidikan yang dapat direplikasi atau diadaptasi oleh peneliti lain yang tertarik pada topik serupa, khususnya dalam mengkaji implementasi kebijakan kurikulum di Indonesia.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Perencanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana Pengorganisasian Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya?
4. Bagaimana Evaluasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya?
5. Apa Faktor Pendukung Manajemen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya?
6. Apa faktor penghambat Manajemen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Kota Tasikmalaya?